

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Ade Sujastiawan¹, Bobby Artawa^{2*}, Muhammad Yamin³

¹²³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: bobbyar4@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: 30 Mei 2024</i> <i>Revised: 14 Juni 2024</i> <i>Published: 30 Juni 2024</i>	Artikel ini mencoba menjelaskan penerapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Pemasar serta menguraikan kendala-kendala yang dihadapi dalam Penerapan Program Keluarga Harapan, keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan merupakan suatu target pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, artikel ini memilih Desa Pemasar kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa sebagai objek penelitian dengan mengambil judul Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Pemasar kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa.
Keywords <i>Kepala Desa;</i> <i>PKH;</i> <i>Masyarakat;</i>	

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu masalah sosial yang sangat besar dan sangat sulit diatasi dan bersifat mendunia, sehingga kemiskinan dapat diartikan sebagai masalah kemanusiaan yang dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah sangat berperan penting dalam berusaha untuk mengurangi angka kemiskinan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga menegaskan bahwasannya kesejahteraan sosial merupakan suatu institusi atau bidang yang dimana melibatkan aktivitas terorganisir yang dilakukan dengan baik oleh suatu lembaga pemerintah maupun swasta guna mencegah, mengatasi atau memberi peran besar terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok serta masyarakat. Setiap daerah pasti memiliki masalah masing-masing, tidak terkecuali daerah Kabupaten Sumbawa Tengah, Sumbawa memiliki beberapa masalah, diantaranya dalam bidang sosial ekonomi, khususnya adalah masalah kemiskinan, masyarakat miskin menjadi kekurangan dan tidak mampu dalam menghadapi perkembangan zaman globalisasi saat ini. Dengan adanya kemiskinan maka menghambat tujuan dan cita-cita daerah.

Sementara itu, pemerintah dalam menjalankan fungsinya melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan berkaitan dengan aspek-aspek lain seperti, kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan aspek lainnya, pada dasarnya masyarakat miskin memiliki kelemahan dalam kemampuan mencukupi kebutuhan hidup serta kemampuan berusaha dan terbatasnya akses terhadap kegiatan sosial ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi tinggi. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan dalam bentuk kebijakan berupa program-program pembangunan. Dalam hal ini adalah masalah sosial ekonomi, dalam rangka penanggulangan kemiskinan maka pemerintah membuat salah satu program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH).

Di Sumbawa khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) telah ada sejak tahun 2013. Kemudian Kabupaten Sumbawa mekar pada tahun 2014 dan membentuk atau terbagi beberapa Kabupaten salah satunya Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari beberapa Kecamatan, salah satunya Kecamatan Mawasangka Timur. Program Keluarga Harapan atau (PKH) masuk di Kecamatan Maronge pada bulan September Tahun 2016 sejak saat itulah dengan adanya program ini masyarakat Maronge khususnya Desa Pemasar sangat terbantu karena salah satu masalah pokok yang ada di Desa Pemasar Kecamatan Maronge adalah masalah pendidikan dan masalah kesehatan, yang beberapa masyarakatnya sangat minim biaya untuk pendidikan maupun kesehatan, juga penerima yang tidak tepat sasaran seperti sejumlah rumah yang tergolong bagus atau mewah dan tergolong mampu kemudian menjadi penerima PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) ialah mensejahterakan masyarakat, kesejahteraan merupakan impian dari semua orang. Tidak heran jika setiap Program yang dicanangkan oleh Pemerintah terutama mengenai Program Keluarga harapan banyak sekali antusias masyarakat. Hal ini pula terjadi pada masyarakat di Desa Pemasar Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa Tengah, yang mana berdasarkan data yang ada dan dikatakan langsung oleh Pendamping Sosial PKH Bapak Poni Alaudin, S.Pd bahwa jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa tersebut adalah sebanyak 152 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), jumlah yang tidak tepat sasaran berjumlah 6 orang.

Artikel ini mencoba menjelaskan penerapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Pemasar serta menguraikan kendala-kendala yang dihadapi dalam Penerapan Program Keluarga Harapan, keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan merupakan suatu target pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, artikel ini memilih Desa Pemasar kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa sebagai objek penelitian dengan mengambil judul Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Pemasar kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa.

METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini memakai metode Kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas, atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat diukur dengan angka atau pendekatan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah bukan eksperimental.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam implementasinya, pelaksanaan sebuah kebijakan adalah perencanaan yang dipraktikkan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini juga dilakukan agar tujuan dari sebuah kebijakan dapat terlaksana dengan baik maka harus digunakan sarana dan prasarana yang memadai, seperti : sekolah, balai desa, serta Puskesmas sebagai penunjang. Pelaksanaan PKH ini dilaksanakan untuk memenuhi tujuan yakni mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM baik di bidang pendidikan maupun kesehatan.

Berdasarkan penelitian diperoleh jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah sebanyak 152 namun didalamnya terdapat 6 (enam) KPM yang tidak tepat sasaran. Adapun bantuan yang diberikan berupa uang tunai yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, akan tetapi bantuan tersebut tidak digunakan dengan semestinya. Hal ini dapat dilihat, bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Pemasar belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menurunnya kualitas Sumber Daya Manusia.

Faktor Pendukung

1. Komunikasi

Komunikasi antara Pendamping dan Peserta PKH telah terjalin dengan baik. Komunikasi tersebut telah memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk memenuhi syarat dan ketentuan yang merupakan syarat wajib bagi Peserta PKH sebelum memperoleh hak menerima dana sebagai Peserta PKH di rekeningnya. Dirasakan oleh peserta PKH Dinas selalu melakukan komunikasi dan PKH dapat memberikan manfaat bagi Peserta PKH untuk memecahkan persoalan hidup sehari-hari mereka.

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Sumber daya manusia di desa Pemasar telah memadai. Sumber Daya manusia yang memadai merupakan sarana pendukung bagi Peserta PKH. jadi, ketika peserta PKH diberikan bantuan pengolahan dana bantuan dan penyuluhan pengembangan keahlian yang kemudian disampaikan oleh Pendamping PKH mendorong potensi keahlian Peserta PKH ini bisa dikembangkan dan PKH sudah memberikan manfaat bagi penerima untuk mengentaskan kemiskinan.

3. Struktur Birokrasi Pemerintahan Desa

Struktur birokrasi pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa telah mendukung implementasi PKH. Kepala Desa telah mampu mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial, untuk mensukseskan PKH. Telah dilakukan berkoordinasi dengan Pendamping PKH dalam melaksanakan dan pembinaan kepada Peserta PKH baik mengenai syarat dan ketentuan yang ditentukan, termasuk ancaman akan sanksi dan pinalti kepada Peserta PKH yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan tersebut.

4. Disposisi

Disposisi Penerima PKH walaupun sudah dapat bantuan, namun masih diberikan pendampingan. Dinas tetap memberikan pembinaan kepada penerima PKH dalam pengelolaan bantuan, sehingga dapat berjalan terus. Selain itu juga adanya dukungan dari Pemerintahan Desa Pemasar melalui Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Sumbawa yang berupa memberi uang bensin dan uang jajan bagi pendamping PKH. Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa juga

mengikutsertakan pendamping dalam kegiatan seminar dan matrikulasi hal ini bertujuan agar menjadikan pendamping lebih professional, sehingga Program Keluarga Harapan (PKH) dapat terus berkembang sampai saat ini.

Faktor Penghambat

1. Watak dan Sikap

Watak dan sikap yang kurang tanggungjawab dari Peserta PKH atas informasi yang diberikan oleh Pendamping PKH. Akibatnya menyebabkan tidak tepatnya waktu penyerahan syarat dan ketentuan dari Peserta PKH, sehingga pencairan dana ke rekening Peserta PKH tidak tepat waktu.

2. Data

Data dilapangan masih ditemukan adanya data Peserta PKH yang tidak akurat, dimana penerima PKH tersebut tidak memenuhi kriteria yang berlaku, namun terdaftar pada data sebagai Peserta PKH. Pada sisi yang lain ketika verifikasi oleh Pendamping PKH ditemukan biodata nama tertentu di masyarakat yang kondisinya sangat miskin, dan sangat layak sebagai Penerima PKH, namun orang yang bersangkutan tidak terdaftar di data Kementerian Sosial, maka orang tersebut tidak berhak menerima bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan tersebut.

KESIMPULAN

Penerimaan bantuan PKH desa Pemasar dilaksanakan sebanyak 4 tahap dalam kurun waktu satu tahun yaitu setiap 3 bulan sekali. Dengan Jumlah bantuan pada bidang pendidikan sebanyak 4.400.000/tahun yang diakumulasikan dari tingkat pendidikan SD senilai 900.000/tahun, SMP senilai 1.500.000/tahun dan SMA senilai 2.000.000/tahun. Kemudian jumlah bantuan pada bidang kesehatan senilai 6.000.000/tahun dengan rincian ibu hamil dan Balita masing-masing sebanyak 3.000.000/tahun. Serta jumlah bantuan pada bidang kesejahteraan sosial sebanyak 4.800.000/tahun yang terdiri dari kelompok lanjut usia senilai 2.400.000/ tahun dan kelompok disabilitas senilai 2.400.000/tahun.

Komunikasi antara Pendamping dan Peserta PKH telah terjalin dengan baik serta Struktur birokrasi pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa telah mendukung implementasi PKH. Selain itu juga adanya dukungan dari Pemerintahan Desa Pemasar melalui Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Sumbawa yang berupa memberi uang bensin dan uang jajan bagi pendamping PKH. Watak dan sikap yang kurang tanggungjawab dari Peserta PKH atas informasi yang diberikan oleh Pendamping PKH. Akibatnya menyebabkan tidak tepatnya waktu penyerahan syarat dan ketentuan dari Peserta PKH, sehingga pencairan dana ke rekening Peserta PKH tidak tepat waktu. Data di lapangan juga masih ditemukan adanya data Peserta PKH yang tidak akurat, dimana penerima PKH tersebut tidak memenuhi kriteria yang berlaku, namun terdaftar pada data sebagai Peserta PKH.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisanjaya, Syahputra Suleman dan Risna Resnawaty. 2019 “Program Keluarga Harapan (PKH) : Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan” Vol. IV, No. 1: 88, - 31 Januari, Amirullah. (2015). Populasi Dan Sampel (pemahaman, jenis dan teknik). *Wood Science and Technology*, 16(4), 293–303.
- Bayu Prakoso, Albertus. 2016. Pola Konsumsi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gebangmalang Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Surabaya :Vol 04 No 1,
- Daud, M., & Marini, Y. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 2(1), 29–38.